# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi merupakan sistem negara yang bertahan untuk diterapkan di Indonesia mulai dari era reformasi (1998) hingga saat ini, mengingat Indonesia telah menganut banyak sistem pemerintahan sebelumnya. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara, demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme dalam struktur pemerintahan suatu negara. Semua warga negara berhak atas pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi hidup mereka. Dalam sistem demokrasi, negara dapat berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah menerapkan definisi negara demokrasi ala Abraham Lincoln, yakni "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Salah satu 'pabrik' dari elemen demokrasi dihasilkan dengan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih kepala daerah maupun kepala negara (Bachtiar, 2014). Hal ini diyakinkan dengan pernyataan Joseph Schumpeter (dalam Nurhadi, 2018), pemilihan umum pada dasarnya untuk mendapatkan suatu pemerintahan atau suatu badan penengah lainnya yang pada saatnya menghasilkan badan eksekutif nasional atau pemerintah. Sedangkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang didefinisikan oleh Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 No. 7 Tahun 2017 adalah sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu seringkali disebut sebagai momentum pesta demokrasi sebab pemilu hanya dapat dilaksanakan secara periodik (5 tahun sekali). Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga 2019 dimana pemenang pemilu presiden terakhir ialah Joko Widodo (Jokowi) yang telah menjabat sebagai presiden dari tahun 2014 hingga 2024 mendatang. Setelah Jokowi menjabat selama dua periode maka ia tidak lagi memiliki hak untuk mencalonkan diri pada pemilihan presiden periode berikutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang secara tegas berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia kelima ini seperti bernostalgia pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia 2009, yakni dengan adanya 3 orang yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden untuk berkontestasi mengisi jabatan presiden periode 2024-2029. Tiga orang yang dimaksud ialah Ex Gubernur

Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ex Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta seseorang yang telah mencalonkan diri selama 3 periode yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berasal sekaligus ketua umum (ketum) dari Partai Gerindra.

Sebelumnya, melalui banyak pertimbangan dan diskusi dalam pemilihan wakil presiden, akhirnya para capres mendeklarasikan orang yang mereka pilih sebagai wakilnya dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Capres Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai wakilnya, Ganjar Pranowo yang memilih Mahfud MD, serta Prabowo Subianto yang memilih Gibran Rakabuming Raka. Dari keputusan ini, sangat banyak pro dan kontra yang muncul di masyarakat. Mulai dari Anies yang awalnya memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakilnya namun secara tiba-tiba diganti hingga Prabowo yang memilih anak presiden yang masih menjabat sebagai wakilnya. Hingga pada 13 November 2023 KPU menetapkan 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan umum 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, perlu dilakukan pembentukan partisipasi partai (koalisi) untuk membentuk sebuah kabinet. Adapun komposisi partisipasi yang turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan terhadap pasangan 3 pasang calon presiden dan wakil presiden terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. 1**
**Komposisi Partisipasi Partai dalam Pilpres 2024**

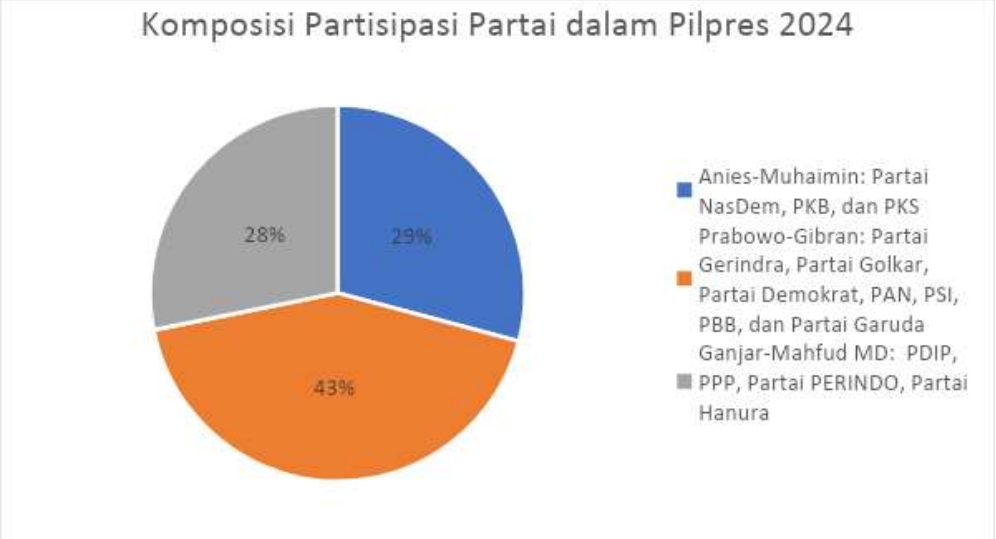


Sumber: (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024)

Pada gambar di atas dapat kita lihat paslon 01 Anies-Muhaimin yang didukung oleh gabungan 3 partai, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah kursi DPR Pemilu 2019 yakni 167 kursi atau 29,04% (dibulatkan menjadi 29%). Selanjutnya, yakni paslon 02 Prabowo-Gibran yang didukung oleh gabungan 7 partai, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 59.726.503 atau 42,67% (dibulatkan menjadi 43%). Begitupun paslon 03 Ganjar-Mahfud didukung oleh 4 partai, diantaranya PDI-Perjuangan, Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah suara sah Pemilu 2019 sejumlah 39.276.935 atau 28,06% (dibulatkan menjadi 28%).

Selain bantuan dukungan yang diberi oleh koalisi partai pengusung, calon presiden dan wakilnya pun perlu menjalin kerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satu contoh orang yang dipercaya memiliki pengaruh besar bagi masyarakat ialah kiai. Pada setiap pemilihan umum (pemilu) suara kiai dan pengikutnya selalu diperebutkan karena dinilai bisa meraih lebih banyak suara pemilih khususnya santri, wali santri, alumni dan simpatisannya. Strategi ini tak hanya dilakukan oleh partai-partai politik yang berbasis islam saja tapi juga dilakukan oleh partai-partai politik berbasis nasionalis (Dewi, 2019). Dikarenakan hal ini dianggap mampu mendapatkan simpati dari para pengikut setia kiai di agama islam, maka dari itu setiap partai politik berharap hal ini dapat menjadi magnet dalam pemilu sehingga tak sedikit partai politik yang memposisikan tokoh pesantren dan kiai dalam deretan kepengurusan partai.

Keterlibatan kiai dalam aktivitas politik sudah lama terjadi. Hal ini selalu mengundang perselisihan antara mereka yang mendukung dan menentang keterlibatan kiai dalam aktivitas politik. Menurut kelompok pertama, kiai harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik karena mereka juga memiliki hak dan keinginan politik sebagai warga negara. Di sisi lain, terdapat kelompok kedua berpendapat bahwa terjun dalam politik kiai lebih banyak menyebabkan *mudharat* daripada keuntungan (Sadi, 2016). Namun pada dasarnya hingga saat ini

mendukung maupun menentang hanya menjadi persepsi masing-masing dan tidak ada aturan yang mengikat tentang batasan kiai dalam berpolitik.

Selanjutnya, terdapat fakta yang diungkapkan oleh Indikator Politik Indonesia bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki potensi pemilih sekitar 16% dari total pemilih di Indonesia. Dibuktikan dengan hasil empat kali Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden sejak 2004-2019 pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden selalu merupakan pasangan unggul di Jawa Timur setelah memenangkan wilayah potensi lain di Indonesia, hingga Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden terakhir tidak ada paslon yang menang secara nasional tanpa mengantongi suara dari Jawa Timur. Karena itu, tidak berlebihan jika Jawa Timur disebut sebagai salah satu 'kunci kemenangan' dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden.

Diketahui dari Assidiq (2020) bahwa saat Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye pada proses Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2019, Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur yang mereka miliki menggandeng kiai-kiai Jawa Timur sebagai strategi untuk memobilisasi pengikut kiai sehingga mendapat dukungan massa lebih banyak. Mobilisasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai tindakan mengorganisasi atau mempersiapkan sesuatu, seperti sekelompok orang untuk suatu tujuan. Strategi kerja sama yang digunakan oleh TKD Jawa Timur Jokowi-Ma'ruf bersama kiai dengan memobilisasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) membuahkan hasil yang terbukti ampuh dengan menghasilkan 16.231.668 suara pemilih dari Jawa Timur, yang mana angka tersebut hampir dua kali lipat dari suara Prabowo-Sandi yakni 8.441.247. Tidak

hanya itu, kekuatan dari dukungan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) juga membuahkan hasil besar bagi paslon Prabowo-Gibran dibanding paslon lainnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024, padahal pada Pemilu Presiden sebelumnya Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) tidak mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. Hasil keunggulan paslon Prabowo-Gibran dapat dilihat melalui diagram berikut:

**Gambar 1. 2**
**Hasil Rekapitulasi Pilpres 2024 Jawa Timur**

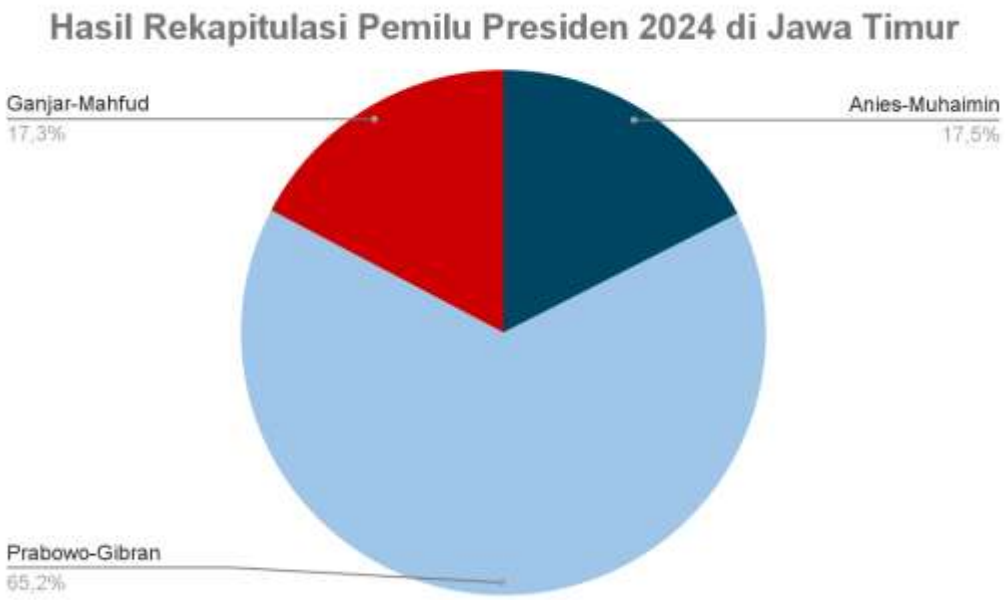


Sumber: https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/rapat-pleno-provinsi-usai-berikut-hasil-rekapitulasi-suara-pilpres-2024-di-jawa-timur dan https://www.detik.com/jatim/berita/d-7235571/final-rekapitulasi-pilpres-2024-di-jatim-prabowo-gibran-menang-telak

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Timur yakni sebanyak 31.402.838 orang. Namun dari jumlah

tersebut hanya terdapat 25.644.060 orang yang suaranya sah. Dapat kita lihat dari diagram lingkaran di atas bahwa paslon Prabowo-Gibran unggul di Jawa Timur dengan meraih 65,2% suara atau sejumlah 16.716.603 penduduk yang mana angka ini terbilang sangat jauh dibanding paslon Anies-Muhaimin yang hanya mendapat 17,5% suara atau sejumlah 4.492.652 penduduk dan paslon Ganjar-Mahfud yang hanya mendapat 17,2% atau sejumlah 4.434.805 penduduk. Dari kedua fenomena di atas dapat kita ketahui dengan adanya sosok kiai dalam menggerakkan pendukung untuk memilih suatu paslon tentu tidak bisa dipandang sebelah mata.

Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) sendiri merupakan relawan politik yang dibentuk oleh Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak yang awalnya bertujuan untuk memenangkan paslon tersebut dalam Pemilihan Gubernur (PilGub) Jawa Timur 2018. Meskipun relawan politik ini berisikan kiai dan santri dari seluruh Indonesia, nyatanya kehadiran mereka tidak ada hubungan struktural dari organisasi islam Nahdlatul Ulama (NU). Setelah tujuan awal dari Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) ini terwujud, mereka yang digerakkan oleh Bu Khofifah Gubernur Jawa Timur dan KH Asep Saifuddin Chalim Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menggagas tujuan baru yakni memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia 2019 hingga memenangkan paslon Prabowo-Gibran pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia 2024. Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan alasan kiai JKSN mendukung paslon Prabowo-Gibran pada Pemilihan Umum (Pemilu)

Presiden Republik Indonesia 2024 yang mana Prabowo sendiri merupakan oposisi dari Jokowi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia 2019.

Diketahui dari CNN Indonesia (2023), masing-masing calon memiliki elektabilitas tinggi pada wilayah yang berbeda di Jawa Timur. Kendati demikian, tingginya elektabilitas calon tidak menjamin banyaknya suara yang diraih dari warga setempat, sehingga menentukan bentuk strategi komunikasi menjadi kewajiban sebagai penetapan sasaran dan juga tujuan jangka panjangnya, terutama bagi organisasi Tim Kampanye Daerah Wilayah Jawa Timur, kemana saja arah dan seperti apa tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Maka dari itu hingga menjelang waktu kampanye setiap paslon menarik hati masyarakat dengan melakukan kunjungan silaturahmi ‘politik’ ke pesantren melalui kiai-kiai yang kebanyakan berada di wilayah Jawa Timur. Dari 3 paslon yang melakukan kunjungan silaturahmi ‘politik’, penulis hanya fokus pada salah satu paslon yakni Prabowo-Gibran yang telah melakukan pertemuan dengan beberapa kiai di wilayah Jawa Timur juga mendapat dukungan dari Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN).

**Gambar 1. 3**
**Potret Kunjungan Prabowo Ke PonPes Tebu Ireng Jawa Timur**

Sumber: https://www.detik.com/jatim/berita/d-7032019/blak-blakan-60-kiai-mataraman-all-out-dukung-prabowo-di-2024

**Gambar 1. 4**
**Potret Kunjungan Gibran Ke PonPes Amanatul Ummah Jawa Timur**

Sumber: https://www.detik.com/jatim/berita/d-7054092/ponpes-amanatul-ummah-jadi-tujuan-lawatan-perdana-gibran-ke-jatim

Pentingnya penulisan ini dilakukan untuk mengetahui alasan dan proses mobilisasi politk yang dilakukan kiai dalam memenangkan pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) pada pemilihan presiden 2024 di Jawa Timur. Dengan adanya perebutan suara yang

sengit di Jawa Timur maka strategi yang dilakukan oleh Tim Kampanye Daerah Wilayah Jawa Timur beserta para kiai untuk memenangkan Prabowo-Gibran dapat dimungkinkan ekstra dibanding saat memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, untuk mempermudah arah proses pembahasan dalam penyusunan skripsi maka penulis bermaksud membahas materi yang terangkum dalam rumusan masalah:

1) Mengapa kiai Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) turut serta dalam memenangkan pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden 2024 di Jawa Timur?
2) Bagaimana proses mobilisasi politik yang dilakukan kiai melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) pada Pemilihan Presiden 2024 di Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yakni menjelaskan alasan mengapa dan bagaimana proses mobilisasi politik dalam memenangkan pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) pada pemilihan presiden 2024 di Jawa Timur.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Dari penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat serta ilmu dan pengetahuan kepada para pembaca, lalu memberikan sebuah pemecahan masalah tersebut secara praktis melalui penulisan yang telah dilakukan.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Kiai memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, memahami peran kiai dalam proses pemilihan presiden dapat memberikan wawasan mengenai hubungan antara agama dan politik serta implikasinya terhadap demokrasi di Indonesia. Adapun manfaat teoritis dari penulisan ini yakni sebagai berikut:

Pertama, penulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kiai mempengaruhi opini dan keputusan politik umat Islam terkhusus pengikut dan orang di sekitarnya. Kiai sering kali dianggap sebagai pemimpin spiritual dan otoritas moral dalam komunitas Muslim. Oleh karena itu, memahami bagaimana kiai menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi pemilihan presiden dapat memberikan wawasan tentang dinamika politik agama di Indonesia.

Kedua, penulisan ini juga dapat memberikan wawasan tentang peran kiai dalam pembentukan opini publik. Kiai seringkali memiliki platform komunikasi yang kuat dengan umat Islam melalui ceramah, pengajian, dan media sosial. Oleh karena itu, memahami bagaimana kiai menggunakan platform ini untuk mempengaruhi opini publik tentang calon presiden dapat memberikan wawasan tentang dinamika komunikasi politik di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini yakni untuk memahami pengaruh, kontribusi kiai yang turut serta dalam proses politik di Indonesia. Penulisan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kiai

mempengaruhi opini publik, memobilisasi massa, dan mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap politik Indonesia. Kemudian, penulisan ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk penulisan lebih lanjut yang berkaitan dengan komunikasi politik khususnya tentang peran kiai dalam pemilihan presiden.

## 1.5 Penulisan Terdahulu

Temuan-temuan dari penulisan sebelumnya merupakan hal yang penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung pada penulisan ini. Penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penulisan ini adalah salah satu sumber data yang dapat digunakan sebagai referensi. Namun, pada konsep, dimensi, dan penjelasan dari penulisan ini pasti berbeda dengan penulisan sebelumnya. Referensi-referensi tersebut berasal dari beberapa penulisan sebagai berikut sebagai berikut ini:

Penulisan pertama yang berkaitan dengan peran kiai dalam pemilu yakni jurnal berjudul "Menakar Peran Kiai Dalam Pemilihan Presiden 2019 (Studi Di Provinsi Jawa Timur)" dengan rumusan masalah "Bagaimana peran kiai di provinsi Jawa Timur saat pemilihan presiden 2019?". Jurnal ini ditulis oleh Dafis Ubaidillah Assiddiq yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran kiai di Jawa Timur bersama TKD (Tim Kampanye Daerah) Jawa Timur dan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) saat pilpres 2019. Dengan tinjauan pustaka *Pengaruh Sosio-Kultural Kiai Dalam Komunikasi Politik Jawa Timur* pada penulisan ini ditemukan bahwa peran kiai-kiai pada pemilihan presiden 2019 ini begitu signifikan dan efektif, terlebih lagi dengan adanya penyerangan isu Suku, Agama,

Ras, dan Antar golongan bagi *incumbent* Joko Widodo. Peran kiai tersebut diantaranya menjadi *Opinion Leader*, Mediator Politik dan *Vote Getter*.

Penulisan kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Mukari, Moch. Mubarok Muharam, dan Mustiqowati Ummul Fithriyyah dengan judul "Kiai sebagai Kekuatan Politik dalam Pemilihan Presiden 2019 di Jawa Timur". Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kekuatan politik kiai dalam Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Jawa Timur sehingga rumusan masalahnya yaitu "Bagaimana kekuatan dan aksi-aksi kiai dalam Pilpres 2019?". Teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni teori elit politik dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca. Pada penulisan ini dikemukakan bahwa kiai telah berhasil memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 dan dapat meminimalisir adanya politik identitas di Jawa Timur.

Penulisan ketiga ialah skripsi karya Aria Praja Mandala dari Universitas Hasanuddin. Penulisan ini bertujuan untuk memahami alasan di balik dukungan yang diberikan oleh organisasi masyarakat GMBI kepada pasangan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi dalam Pilkada 2020 di Kota Makassar. Selain itu, penulisan ini juga berfokus pada upaya mengungkap strategi yang diterapkan oleh GMBI untuk membantu memenangkan pasangan tersebut dalam pemilihan. Penulisan ini menggunakan teori mobilisasi politik yang dikemukakan oleh Stefano Bartolini. Berdasarkan hasil penulisan, dukungan organisasi GMBI terhadap pasangan Danny-Fatma dalam Pilkada 2020 di Kota Makassar didasari oleh tujuan untuk memajukan Kota Makassar dan menjadikannya lebih baik. Untuk mendukung kemenangan pasangan tersebut, GMBI menerapkan berbagai

strategi, seperti memasang baliho dan spanduk, mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat, serta memberikan instruksi langsung dan menggerakkan anggotanya.

Penulisan keempat merupakan jurnal yang ditulis oleh Rizky Amalia Aziz yang berjudul "Kiai dan Politik Elektoral: Peran Kiai Yusuf Chudlori dalam Pemenangan Kandidat Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 di Kecamatan Tegalrejo". Penulisan yang dilakukan dengan metode kualitatif ini membuktikan bahwa pemenangan kandidat Jokowi-Ma'ruf di Tegalrejo menjadi efektif karena Gus Yusuf berperan kolaboratif sebagai konsolidator yang bergerak di level elit dan mobilisator yang bergerak di level akar rumput.

Penulisan kelima yakni skripsi yang ditulis oleh Amalia Sukma Cahyani yang berjudul "Peran Ulama Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Kontestasi Pemilihan Bupati Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020". Penilitian ini menggunakan teori perilaku politik oleh Ramlan Surbakti dan Teori Elite oleh Pareto dan Putnam dengan metode kualitatif deskriptif. Penulisan menunjukan bahwa peran Ulama dari Kalangan Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 adalah sebagai tokoh yang menjadi rujukan akan keilmuannya dan menjadi referensi dalam menentukan sikap politik. Yang melatarbelakangi Ulama atau kyai Nahdlatul Ulama untuk turut dalam proses Pemilihan Bupati Purbalingga utamanya ialah faktor agama dan hubungan saling membutuhkan agama dengan politik.

Dari lima penulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang berpengaruh seperti kiai maupun organisasi lokal dalam politik sangat signifikan, terutama

dalam konteks pemilihan umum. Secara umum, keberhasilan pemenangan kandidat juga bergantung pada kolaborasi strategis antara tokoh masyarakat dengan kandidat pemilihan umum. Untuk membuat *Gap Research* penulisan sebelumnya dan penulisan yang akan dibuat, penulis mencoba mencari tahu tentang alasan yang membuat kiai JKSN turut serta dalam memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 sebagai presiden. Tidak hanya itu, dalam penulisan ini juga mencari tahu bagaimana proses mobilisasi politik yang dilakukan kiai sebagai *informal leader* melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN).

## 1.6 Tinjauan Teoritis

### 1.6.1 Konsep *Informal Leader*

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam dinamika kehidupan sosial dan organisasi. Fairchild (dalam Liow et al, 2015) mengemukakan definisi mengenai pemimpin di mana dalam arti yang lebih luas, seorang pemimpin adalah individu yang mengambil peran untuk mengarahkan perilaku orang lain dalam kehidupan sosial. Mereka melakukan ini dengan cara mengatur, memberi arahan, menyusun organisasi, dan mengawasi berbagai upaya anggotanya menggunakan wewenang, kedudukan, atau pengaruh yang mereka miliki. Sementara dalam pengertian yang lebih sempit, pemimpin diartikan sebagai seseorang yang mampu menuntun dan memandu pengikutnya melalui kemampuan meyakinkan yang baik, dimana para pengikutnya dengan sukarela menerima dan mengikuti arahannya. Definisi di atas sejalan dengan Soelistya (2022) yang mengartikan pemimpin sebagai seseorang yang memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menggunakan kemampuan tersebut dengan sikap serta perilaku yang membimbing dan mendorong individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Ia menciptakan kesatuan pemahaman dan mendorong kerja sama demi keberhasilan bersama.

Dalam dinamika kepemimpinan masyarakat, pada dasarnya pemimpin telah dibagi menjadi dua, diantaranya ialah pemimpin formal dan informal. Seseorang bisa menjadi pemimpin tanpa jabatan resmi dalam organisasi, yang dikenal sebagai pemimpin informal. Sari (2023:34) mengemukakan bahwa pemimpin informal adalah mereka yang tidak menerima pengangkatan secara resmi atau ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi karena keunggulan dan kelebihan kualitas pribadi, mereka mencapai peran sebagai orang yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku kelompok atau masyarakat di sekitarnya. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pemimpin formal di mana pemimpin formal menurut Sari (2023:33) ialah seseorang yang bisa menjadi pemimpin karena telah mendapatkan pengakuan resmi atau keabsahan secara hukum. Pengangkatannya dilakukan melalui berbagai cara yang sah dan diakui, seperti melalui proses pemilihan umum, dipilih dalam sebuah kongres organisasi, ditentukan dalam muktamar, atau melalui mekanisme pengangkatan resmi lainnya. Selanjutnya, pemimpin informal memiliki pengaruh karena kepribadian yang kuat serta kemampuan dan kualitas personal yang mereka miliki. Meski tidak memiliki posisi struktural, mereka mampu mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat, baik ke arah yang membangun maupun merusak.

Di tengah masyarakat, contoh pemimpin informal dapat ditemui pada sosok seperti kiai, ustadz, ulama, atau tokoh masyarakat yang dihormati (Syah dalam Supriati, 2018). Masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemimpin informal karena mereka telah membuktikan diri memiliki keahlian dan kharisma yang istimewa. Kemampuan mereka dalam membimbing dan memandu masyarakat telah teruji dan mendapat pengakuan dari warga sekitar (Bramantyo & Kusumaningrum, 2024).

Wahidin dkk (2017) memberikan pernyataan pada masa sekarang, munculnya pemimpin informal sering berkaitan dengan berbagai kebutuhan baru dalam masyarakat, seperti di bidang keagamaan, pendidikan, politik, dan sektor lainnya. Yang menarik, pengaruh pemimpin informal tidak terbatas pada wilayah tertentu saja mereka bisa memiliki dampak yang luas, baik di lingkungan tempat tinggal mereka maupun di luar daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin informal bisa menjadi indikator perkembangan suatu masyarakat, yang membuktikan betapa pentingnya peran mereka dalam dinamika kehidupan sosial.

Kekuatan kharismatik yang dimiliki seorang kiai memainkan peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam aspek moral. Pengaruh kiai tidak terbatas pada upaya perbaikan moral dan tatanan sosial saja, tetapi juga merambah ke ranah politik. Dengan kepribadian yang memiliki daya tarik kuat, seorang kiai mampu memberikan pengaruh yang luas di berbagai bidang kehidupan. Pengaruh ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh kalangan elit seperti pejabat

pemerintah dan tokoh-tokoh partai politik, yang sering mencari dukungan dan legitimasi dari para kiai (Patoni, 2019). Salah satu bukti nyata dari *statement* ini ialah sosok kiai sebagai pemimpin informal yang memiliki banyak pengikut juga turut serta dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang yang diantaranya terdapat bidang politik. Kemampuan kiai meng-*influence* pengikutnya dalam proses mobilisasi untuk mendukung paslon tertentu dalam beberapa Pemilu berbeda ternyata tidak jarang membuahkan hasil baik bagi paslon yang mereka dukung dan tentunya ikut serta dalam perkembangan kebijakan yang ada.

Selanjutnya terdapat enam ciri-ciri dari pemimpin informal yang dikemukakan oleh Sari (2023: 35-36), Pertama, mereka menjadi pemimpin tanpa ada pengangkatan atau pengesahan resmi. Kedua, kepemimpinan mereka muncul karena pengakuan spontan dari masyarakat, dan posisi mereka sebagai pemimpin akan bertahan selama masyarakat masih mempercayai dan menerima kepribadian mereka. Ketiga, dalam menjalankan peran kepemimpinannya, mereka tidak mendapat dukungan dari organisasi formal manapun. Keempat, mereka memimpin tanpa mengharapkan atau menerima bayaran atau kompensasi. Kelima, posisi mereka tidak bisa dipindahkan, tidak ada sistem kenaikan jabatan, dan mereka tidak memiliki atasan yang mengatur. Keenam, ketika mereka membuat kesalahan, tidak ada hukuman formal yang bisa diberikan, namun dampaknya adalah berkurangnya rasa hormat masyarakat terhadap mereka.

Bramantyo & Kusumaningrum (2024) juga mengatakan meskipun tidak memegang jabatan resmi dalam pemerintahan, pemimpin informal memiliki

pengaruh yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu program atau pengembangan di masyarakat. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan mereka dalam memahami gerak-gerik masyarakat, mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, dan memimpin tanpa perlu pengakuan resmi. Hal ini menjadikan mereka sebagai tokoh yang sangat penting dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembangunan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran kiai dalam memobilisasi pengikutnya terkhusus Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di wilayah Jawa Timur dalam mendukung pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden 2024, penulis pun menggunakan konsep mobilisasi politik sebagai pendukung.

### 1.6.2 Konsep Jaringan Kiai dan Politik

Jaringan kiai dalam konteks politik Indonesia memiliki akar yang kuat dalam dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Muslim. Kiai dan pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, telah lama memainkan peran sentral dalam membentuk opini publik dan memberikan legitimasi terhadap kepemimpinan politik. Dalam bukunya Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (2000), Robert W. Hefner memberikan analisis mendalam tentang peran Islam dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk peran kiai dan jaringan mereka dalam politik. Hefner menekankan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang memengaruhi dinamika demokrasi.

Hal tersebut didukung oleh Miftah Qomar dalam bukunya Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi (2002) yang

memperdalam pemahaman tentang transformasi pesantren di Indonesia modern, di mana lembaga ini tidak lagi sekadar menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga berkembang menjadi basis pergerakan politik yang efektif. Qomar menguraikan bagaimana demokratisasi institusi pesantren membuka ruang bagi keterlibatan lebih luas dalam politik formal, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi basis legitimasi kiai. Dalam perkembangannya, pesantren menjadi laboratorium politik di mana santri tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama tetapi juga dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi.

Hefner (2000) juga menyoroti bagaimana masyarakat Islam di Indonesia berkembang dalam hubungan yang kompleks dengan demokratisasi dan modernitas, di mana ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai aktor politik yang berpengaruh. Secara historis, kiai telah menjadi bagian penting dari struktur sosial masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Hefner mencatat bahwa jaringan pesantren yang dipimpin oleh para kiai telah menjadi salah satu institusi sosial paling berkelanjutan dalam sejarah Indonesia. Institusi ini memberikan basis kultural dan material bagi pengaruh sosial-politik para kiai.

Hefner (2000) mengidentifikasi bahwa jaringan kiai sering kali menjadi basis kekuatan politik, terutama dalam konteks Indonesia. Jaringan ini dibangun melalui pesantren, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), dan hubungan personal antara kiai dengan murid-muridnya. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan ajaran agama, tetapi juga sebagai alat mobilisasi politik yang memungkinkan kiai untuk memobilisasi massa dalam pemilihan umum atau aksi-aksi politik lainnya. Clifford Geertz dalam karya klasiknya Agama Jawa:

Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa (2013) telah menggambarkan dengan jelas bagaimana santri sebagai kategori sosial memiliki kedekatan dengan Islam normatif dan bagaimana kiai menjadi figur sentral dalam membentuk identitas keislaman mereka. Geertz menunjukkan bahwa pengaruh kiai melampaui batas-batas keagamaan dan merambah ke wilayah sosial-politik, dengan otoritas yang berakar pada kapasitas intelektual dalam tradisi Islam dan kemampuan untuk menerjemahkan ajaran agama ke dalam konteks sosial.

Salah satu karakteristik penting dari jaringan kiai adalah sifatnya yang adaptif. Menurut Hefner, para kiai telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi politik, sambil tetap mempertahankan basis otoritas tradisional mereka. Adaptasi ini melibatkan kombinasi konservatisme kultural dengan pragmatisme politik. Pengelolaan JKSN pada konteks Pemilihan Presiden 2024 dapat dianalisis sebagai manifestasi kontemporer dari kemampuan adaptif tersebut.

### 1.6.3 Konsep Mobilisasi Politik

Seseorang yang memiliki pengaruh biasanya cenderung mempunyai suatu kekuatan untuk menggiring para pengikutnya sesuai dengan tujuan tertentu. Konsep mobilisasi politik merupakan sebuah bentuk aksi kolektif dan gerakan sosial yang muncul di dalam masyarakat (Tilly, 1978:7). Hal tersebut juga identik dengan keterlibatan satu aktor yang memiliki pengaruh besar di dalam sebuah kelompok untuk memenuhi dan mencapai tujuan bersama. Umumnya, mobilisasi terjadi karena ada suatu keluhan yang mendasar (Somma, 2023).

Konsep mobiliasasi pun terdiri dari beberapa komponen faktor yang saling berkaitan, seperti faktor kepentingan, organisasi, sumber daya, strategi peluang politik. Keempat faktor tersebut menentukan bagaimana mobilisasi bisa berjalan di dalam sebuah konteks politik. Sebab, sebuah pergerakan atau mobilisasi dapat melahirkan beberapa peluang aksi (McAdam, 2003). Menurut model mobilisasi oleh Tilly (1978:56), aktor berpengaruh memiliki beberapa komponen penyusun untuk dapat memengaruhi dan memobilisasi dukungan.

**Gambar 1. 5**
**Kerangka Mobilisasi**

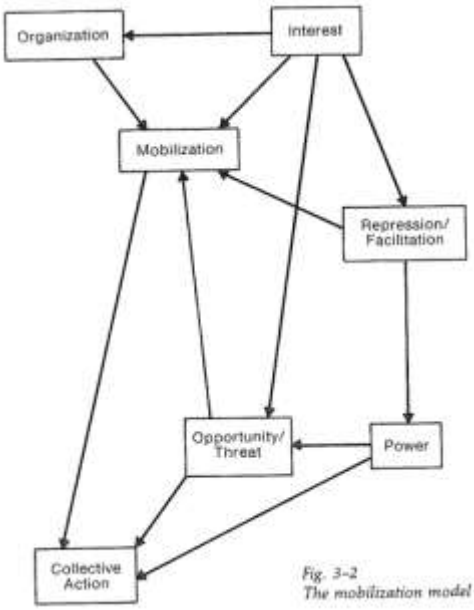


Sumber: From Mobilization to Revolution (Tilly, 1978)

Kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan mobilisasi tidak hanya bergantung pada popularitas atau kharisma personal, tetapi juga pada

kemampuan mengorganisir dan mengelola berbagai komponen penting dalam kontestasi politik.

Komponen pertama dapat dilihat berdasarkan aspek kepentingan dan pengaruh personal, di mana seorang aktor berpengaruh harus mampu mengartikulasikan kepentingan publik, memanfaatkan kharisma personal, dan membangun reputasi politik yang kuat. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuannya menyatukan berbagai kepentingan kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan organisasi politik menjadi sangat krusial, mencakup kemampuan membangun dan mengendalikan mesin partai, mengkoordinasikan tim kampanye, dan mengelola jaringan politik hingga ke tingkat akar rumput.

Mobilisasi sumber daya merupakan aspek vital lainnya dalam kontestasi pilpres. Seorang aktor berpengaruh perlu menunjukkan kemampuannya dalam menggalang dana kampanye, mengerahkan massa pendukung, memanfaatkan media dan teknologi komunikasi, serta mengoptimalkan berbagai sumber daya organisasi pendukung. Pemanfaatan peluang politik juga menjadi faktor penentu keberhasilan, termasuk pemahaman mendalam terhadap konteks politik nasional, ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan strategis, dan kemampuan merespons isu-isu publik yang berkembang.

Manifestasi dari mobilisasi politik dalam suatu agenda politik terlihat dari berbagai bentuk aksi kolektif, seperti kampanye terorganisir, gerakan pendukung yang masif, dan mobilisasi suara di tingkat akar rumput. Keberhasilan ini didukung oleh implementasi praktis yang mencakup pembentukan citra politik

yang kuat, pengelolaan dukungan yang efektif, optimalisasi kampanye, dan strategi pemenangan yang terukur. Aktor berpengaruh juga perlu memperhatikan aspek pengelolaan pasca kampanye untuk mempertahankan soliditas pendukung dan membangun legitimasi politik yang berkelanjutan.

Pada hal lain, McAdam (2001) turut menjelaskan berdasarkan perspektif proses politik, di mana terdapat tiga faktor utama yang saling berkaitan dalam praktik mobilisasi politik. Faktor pertama adalah peluang politik yang menguntungkan (*political opportunities*). McAdam menjelaskan bahwa kondisi politik yang kondusif menciptakan momentum bagi kelompok-kelompok untuk memobilisasi dukungan. Peluang politik ini bisa berupa perubahan kebijakan, perpecahan di kalangan elit, munculnya sekutu-sekutu berpengaruh, atau melemahnya kemampuan negara untuk menekan gerakan oposisi. Dalam konteks elektoral, peluang politik bisa muncul dari ketidakpuasan publik terhadap rezim yang berkuasa, krisis ekonomi, atau perubahan sistem politik yang membuka ruang partisipasi lebih luas.

Faktor kedua yaitu berdasarkan kekuatan organisasi di tingkat akar rumput (*indigenous organizational strength*). Sebab, keberadaan jaringan sosial dan organisasi yang kuat di level *grassroots* sangat penting untuk memfasilitasi mobilisasi. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai "struktur mobilisasi" yang menyediakan sumber daya, jaringan komunikasi, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menggerakkan massa. McAdam menekankan bahwa tanpa struktur organisasi yang kuat di tingkat akar rumput, bahkan peluang politik yang baik tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Faktor ketiga adalah melalui kesadaran kolektif atau yang disebut McAdam sebagai "*cognitive liberation*" (pembebasan kognitif). Ini merujuk pada perubahan cara pandang masyarakat yang mulai melihat bahwa kondisi yang ada tidak adil dan dapat diubah melalui aksi kolektif. Pembebasan kognitif ini melibatkan tiga pemahaman kunci, yaitu, sistem yang ada dipandang tidak sesuai, masyarakat mulai menuntut hak-hak mereka, dan ada keyakinan bahwa perubahan mungkin dilakukan melalui tindakan kolektif. McAdam menekankan bahwa tanpa kesadaran kolektif ini, mobilisasi akan sulit terjadi meskipun ada peluang politik dan organisasi yang kuat.

Konsep mobilisasi politik yang dikemukakan oleh Charles Tilly (1978) menawarkan kerangka analitis yang mendalam tentang bagaimana gerakan sosial dan aksi kolektif dapat mencapai tujuannya. Tilly mengembangkan model yang dikenal sebagai "*polity model*," yang menekankan empat faktor fundamental dalam mobilisasi politik: *interest* (kepentingan bersama), *organization* (organisasi yang menyatukan), *mobilization* (mobilisasi sumber daya), dan *opportunity* (struktur peluang politik). Menurut pemahaman Tilly, kepentingan bersama menjadi sebuah hal yang penting untuk menggerakkan individu agar berpartisipasi dalam aksi kolektif. Organisasi pun turut berfungsi sebagai wadah yang memfasilitasi koordinasi dan agregasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya mencakup aspek material, manusia, budaya, dan moral yang dapat dimanfaatkan kelompok untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, struktur peluang politik mengacu pada kondisi eksternal yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan aksi kolektif.

Dalam konsep mobilisasi politik Tilly, ketika terjadi kesamaan kepentingan dalam suatu organisasi, unsur represi/fasilitasi dapat muncul sebagai dinamika yang memengaruhi proses mobilisasi. Represi/fasilitasi ini berperan sebagai unsur turunan yang tercipta di antara interaksi empat faktor fundamental (kepentingan, organisasi, mobilisasi, dan peluang). Represi dapat muncul sebagai hambatan atau tekanan terhadap aksi kolektif, sementara fasilitasi berperan sebagai pendukung yang mempermudah tercapainya tujuan mobilisasi. Pada dimensi lain, kekuatan (*power*) juga muncul sebagai faktor turunan yang terbentuk dari interaksi keempat faktor fundamental tersebut. Kekuatan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti pengaruh politik, legitimasi sosial, atau kapasitas untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, Tilly menekankan bahwa kehadiran dan interaksi keempat faktor fundamental tidak hanya penting untuk menghasilkan aksi kolektif, tetapi juga berperan dalam membentuk dinamika kekuatan dan represi/fasilitasi yang pada akhirnya menentukan efektivitas mobilisasi politik. Interaksi kompleks ini menunjukkan bagaimana mobilisasi politik tidak hanya bergantung pada keberadaan faktor-faktor fundamental, tetapi juga pada bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan menciptakan kondisi-kondisi baru dalam proses mobilisasi.

Dalam konteks politik kontemporer, konsep tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi politik yang efektif membutuhkan tidak hanya organisasi dan sumber daya yang kuat, tetapi juga momentum politik yang tepat, jaringan akar rumput yang solid, serta kemampuan untuk membangun kesadaran kolektif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pemahaman ini menjadi relevan untuk

menganalisis berbagai bentuk gerakan politik, mulai dari kampanye pemilihan umum hingga gerakan sosial yang lebih luas.

Konsep ini dapat dikonseptualisasikan ke dalam penulisan ini untuk melihat mobilisasi politik yang dilakukan oleh *informal leader* seperti kiai dalam melakukan mobilisasi guna memenangkan kandidat dalam pemilihan umum, dalam penulisan ini massa yang dimobilisasi ialah Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN). Dalam konteks pemilihan Presiden 2024 mobilisasi Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Jawa Timur yang dilakukan oleh kiai menunjukkan peran ia sebagai pemimpin informal, hal ini menjadi manifestasi nyata dari dinamika partisipasi politik yang kompleks.

Dengan pendekatan persuasif dan memanfaatkan ikatan emosional serta identitas kolektif, kiai mampu mendorong keterlibatan massa secara signifikan dalam proses demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun indonesia telah memasuki era reformasi dengan mekanisme demokrasi yang lebih terbuka, pengaruh pemimpin informal masih tetap mendominasi terutama dalam konteks masyarakat kalangan santri. Mobilisasi politik yang dilakukan oleh kiai tidak hanya untuk mendapatkan dukungan suara saja, akan tetapi juga representasi dari kontinuitas hubungan kuasa dan kepemimpinan yang telah melekat dalam struktur sosial masyarakat Jawa Timur.

## 1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu rasional yang dibangun oleh penulis yang merupakan bangunan teori yang dihasilkan dari proses sintesa dan komparasi dari berbagai teori, konsep, dan hasil-hasil penulisan. Dengan kerangka berpikir,

penulis semakin kokoh untuk menuju ke hipotesis. Berikut kerangka berpikir dalam penulisan ini:

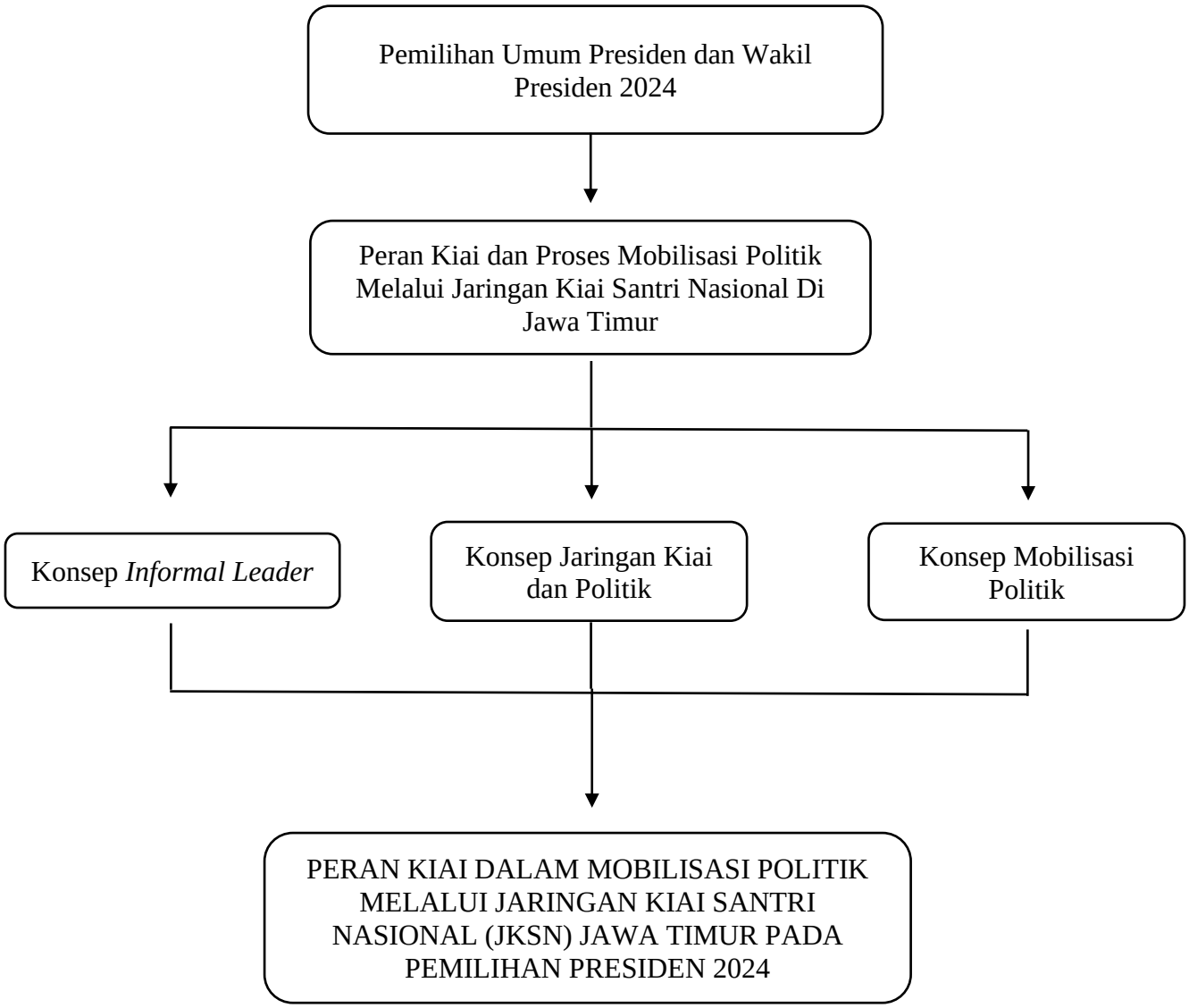


### 1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan proses penentuan indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Biasanya indikator-indikator yang digunakan berasal dari teori atau konsep yang telah ditentukan penulis

sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan konsep yang sesuai dengan penulisan yang akan dilakukan yakni konsep mobilisasi politik.

Kedua konsep yang di atas saling terikat satu sama lain karena penulis akan membahas peran kiai dalam pemilihan presiden 2024 khususnya dalam mobilisasi melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) untuk Prabowo-Gibran di Jawa Timur sehingga harus dimengerti dahulu posisi kiai di kalangan masyarakat dan bagaimana strategi dan perencanaannya dalam memenangkan salah satu paslon yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Dengan itu ketiga konsep tersebut dapat dijadikan acuan yang benar dalam proses penulisan.

**Tabel 1. 1**
**Operasionalisasi Konsep**

| Konsep | Indikator | Definisi | Operasionalisasi |
|---|---|---|---|
| Mobilisasi Politik (Tilly, 1978) | Kepentingan | Kepentingan merujuk pada tujuan atau agenda yang ingin dicapai oleh kelompok atau individu melalui mobilisasi politik. Dalam konteks ini, kepentingan dapat berupa dukungan politik terhadap calon presiden tertentu yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh kiai JKSN. | Alasan kiai mendukung kandidat tertentu dalam Pilpres 2024 melalui JKSN. |
| | Organisasi | Organisasi merujuk pada struktur dan strategi/mekanisme yang | Struktur kepemimpinan JKSN, mekanisme komu-nikasi dan koordinasi an-tar-kiai dan massa, serta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | digunakan untuk mengkoordinasikan mobilisasi politik. | pola jaringan yang digunakan dalam mobilisasi politik. |
| | Mobilisasi | Mobilisasi merujuk pada proses pengumpulan dan pengarahan sumber daya (manusia, materi, dan simbolis) untuk mencapai tujuan politik. | Kegiatan mobilisasi yang dilakukan oleh Kiai melalui JKSN (misalnya: ceramah, sosialisasi, atau kampanye). |
| | Represi atau Fasilitasi | Represi merujuk pada hambatan atau tekanan yang dihadapi dalam mobilisasi, sementara fasilitasi merujuk pada dukungan atau kemudahan yang diberikan. | Hambatan yang dihadapi kiai dalam mobilisasi melalui JKSN serta dukungan yang diterima JKSN dalam proses mobilisasi. |
| | Peluang atau Ancaman | Peluang merujuk pada kondisi politik atau sosial yang memungkinkan mobilisasi terjadi, sementara ancaman merujuk pada faktor yang dapat menghambat atau mengancam mobilisasi. | Peluang politik yang dimanfaatkan JKSN, seperti momentum elektoral dan kedekatan dengan elite politik, serta ancaman yang dapat menghambat, seperti perpecahan internal. |
| | Kekuatan | Kekuatan merujuk pada kapasitas kelompok atau individu untuk mempengaruhi proses dan hasil politik. | Pengaruh Kiai dalam memobilisasi santri dan masyarakat. |

## 1.9 Metode Penulisan

### 1.9.1 Tipe Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan tipe penulisan studi kasus yang dimaksudkan untuk melakukan analisis dan menjelaskan secara detail mengenai peran kiai khususnya dalam mobilisasi politik melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) untuk Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden tahun 2024 di Jawa Timur. Menurut Creswell (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019) penulisan kualitatif merupakan penulisan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selain itu, Creswell juga menjelaskan bahwa proses penulisan kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penulisan studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang membahas penulisan tentang sistem (kasus) atau beberapa kasus dari waktu ke waktu, secara rinci, dan mendalam (Werdiningsih & Hamid, 2022). Tipe penulisan studi kasus digunakan untuk mengamati secara detail tentang suatu masalah yang terjadi, dalam hal ini mengenai bagaimana peran kiai khususnya dalam mobilisasi politik melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) untuk Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden tahun 2024 di Jawa Timur.

### 1.9.2 Lokasi Penulisan

Penulisan ini dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain:

1. Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto
2. Pondok Pesantren Nurur Rohman Sidoarjo
3. Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi, Sidoarjo
4. Sekretariat Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur Prabowo-Gibran
5. Online (*Whatsapp Call*)

### 1.9.3 Subjek Penulisan

Subjek penulisan sering disebut sebagai "partisipan" atau "informan", karena sesungguhnya subjek penulisan merupakan individu atau kelompok yang akan diamati serta diminta untuk memberikan data atau informasi terkait dengan fenomena yang terjadi. Fokus dari penulisan ini ialah proses mobilisasi politik kiai khususnya dalam memobilisasi jaringan kiai santri nasional (JKSN) untuk Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden tahun 2024 di Jawa Timur. Dengan demikian subjek yang dibutuhkan dalam penulisan ini ialah:

1. Penasihat Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN)
2. Wakil Ketua Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN)
3. Kiai di Jawa Timur yang terlibat dalam JKSN
4. Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Prabowo-Gibran

### 1.9.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penulisan diperoleh (Sujarweni, 2014:73). Selain itu, Sugiyono (2016:225) menyatakan bahwa sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer yang mana data yang diperoleh penulis didapat melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada penulis, serta data sekunder yaitu penulis tidak langsung menerima dari sumber data. Dengan ini sumber data dari penulisan ini diperoleh dari data primer serta data sekunder yang akan dijelaskan di bawah ini:

#### 1.9.4.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data primer ini diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara penulis dengan narasumber (Sujarweni, 2014:73). Dalam penulisan ini, data primer didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa foto dari narasumber atau informan yang terlibat selama proses mobilisasi politik melalui JKSN untuk Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden tahun 2024.

#### 1.9.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi

perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya (Sujarweni, 2014:74). Dalam penulisan ini, data sekunder didapat dari penulisan terdahulu, artikel, maupun situs internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2016: 225). Dalam penulisan ini pun penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Di bawah ini adalah penjelasan tentang teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut:

#### 1.9.5.1 Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama pengumpulan data untuk mengeksplorasi peran kiai dalam mobilisasi politik melalui Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur pada Pemilihan Presiden 2024. Secara spesifik, penulis menerapkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi secara komprehensif dari para informan yang terlibat langsung dalam jaringan tersebut. Berbeda dengan wawancara terarah (*guided interview*) yang menggunakan pertanyaan terstruktur, metode wawancara mendalam memungkinkan penulis untuk terlibat secara intensif dengan kehidupan informan dan melakukan tanya jawab secara lebih fleksibel tanpa terbatas pada daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan sebelumnya. Pendekatan ini menciptakan suasana wawancara yang lebih dinamis dan alamiah, sehingga memungkinkan penulis memperoleh perspektif yang lebih otentik dari para kiai yang berperan dalam mobilisasi politik melalui JKSN. Melalui interaksi langsung dengan para informan, baik secara tatap muka (*face-to-face*) maupun menggunakan media komunikasi seperti telepon ketika diperlukan, penulis dapat menganalisis secara mendalam perspektif, pengalaman, dan pendapat para kiai tentang peran mereka dalam memobilisasi dukungan politik untuk Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024, khususnya di wilayah Jawa Timur.

**1.9.5.2 Dokumentasi**

Untuk melengkapi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung yang memperkuat data hasil wawancara mendalam dengan para kiai dalam Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur serta tim kampanye daerah Jawa Timur Prabowo-Gibran. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016:240), dokumentasi mencakup berbagai bentuk informasi seperti tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Dalam konteks penelitian tentang peran kiai dalam mobilisasi politik pada Pemilihan Presiden 2024, penulis mengumpulkan dokumentasi berupa studi pustaka yang meliputi literatur relevan tentang JKSN, mobilisasi politik pesantren, serta dinamika politik di Jawa Timur. Selain itu, peneliti juga mengambil dan menyimpan dokumentasi visual berupa foto-foto saat mewawancarai para narasumber yang memberikan informasi terkait peran mereka dalam JKSN. Penggunaan dokumentasi ini

berfungsi sebagai pelengkap data wawancara yang penting untuk memastikan transparansi proses penelitian, reproduktibilitas temuan, serta meningkatkan validitas hasil penelitian mengenai peran strategis para kiai dalam memobilisasi dukungan politik melalui JKSN di Jawa Timur selama kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

### 1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu teknik dari pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penulisan untuk mendapat hasil dari penulisan. Dalam hal ini Sugiyono (2016:244) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, hasil wawancara serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari, juga membuat kesimpulan yang membuatnya mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.

Pada penulisan ini, penulis menggunakan model analisis data ala Miles dan Huberman, di mana dalam buku Sugiyono (2016:246) Miles dan Huberman mengatakan bahwa analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Tidak hanya itu, menurut Miles dan Huberman (1992) (dalam Agusta, 2003) terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini didukung dengan pola analisis data dengan mengikuti model interaktif yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 6**
**Komponen Dalam Analisis Data**

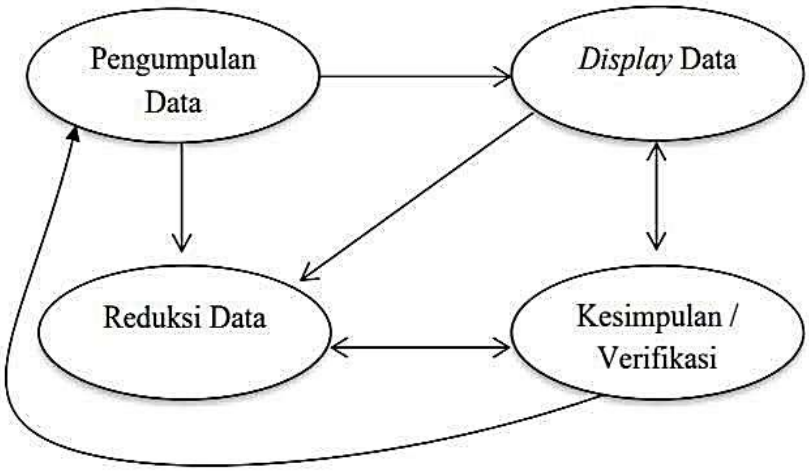


*Sumber: (Sugiyono, 2016)*

Penjabaran dari komponen pada pola analisis data yang digunakan penulis yakni sebagai berikut:

### 1.9.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Agusta, 2003). Dalam hal ini penulis akan mempersempit, merangkum, serta memfokuskan data yang paling merujuk pada topik penulisan dengan tujuan mempermudah penulis dalam mendapatkan gambaran nyata terkait masalah yang sedang diteliti, kesimpulan serta dalam pengumpulan data selanjutnya.

### 1.9.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah yang dilakukan setelah mereduksi data ialah menyajikan data. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan penulis agar data penulisan

terorganisir sehingga mudah dipahami. Penyajian data dalam penulisan kualitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, pictogram, uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Namun bentuk yang kerap digunakan ialah teks yang mendeskripsikan hasil data yang ditemukan menggunakan uraian kalimat. Dengan tahap menyajikan data ini, data disusun dan diorganisasikan akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2016:249).

**1.9.6.3 Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menganalisis penulisan kualitatif. Sederhananya, penarikan kesimpulan dalam teknik analisis data merujuk pada proses menyimpulkan informasi atau membuat keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan juga harus sesuai dengan fokus dan tujuan penulisan. Dalam tahap inilah kesimpulan yang dihasilkan sudah bersifat tetap dan akurat dengan dibuktikan oleh data-data lapangan yang faktual. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif juga merupakan temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya (Sugiyono, 2016:253).